

DAFTAR BACAAN

Buku-Buku:

Ardiwilaga, Roestandi, *Hukum Agraria Indonesia*, Masa Baru, Bandung, 1997

Chomzah, Ali Achmad, *Hukum Pertanahan, Seri Hukum Pertanahan I Pemberian Hak Atas Tanah Negara*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2002

Hadjon, Philipus M., “*Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Administrasi*”, Makalah Disampaikan pada Semiloka Nasional Pemberdayaan Budaya Hukum dalam Perlindungan HAM di Indonesia diselenggarakan oleh Program Doktor Ilmu Hukum Undip, (Semarang tanggal 21 Juni 2004

_____, *Pengertian-pengertian Dasar tentang Tindak Pemerintahan (Bestuusshandling)*, Djumali, Surabaya, 1985

_____, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987

_____, “*Tolok ukur Keabsahan tindak Pemerintahan dan Keputusan Tata Usaha Negara*”, Makalah disampaikan pada Penyelenggaraan House Legal Training Hukum Administrasi dan PTUN Pegawai Bank Indoensia tanggal 19-29 Juli 2004

Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indoensia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 2003

Mertokusumo, Sudikmo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999

Minarno, Nur Basuki, “*Penyalahgunaan Wewenang dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang berimplikasi Tindak Pidana Korupsi*”. Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Program Pasacasarjana Universitas Airlangga Surabaya 2006

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Nurlinda, Ida, *Monograf Hukum Agraria, Reforma Agrararia Untuk Kesejahteraan Rakyat dan Keadilan Agraria*, LoGoz Publishing, Bandung, 2013

- Parlindungan, A.P, *Hak Pengelolaan Menurut Sistem UUPA*, Mandar M Bandung, 1989
- _____, *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Alumni, Bandung, 1992
- Perangin, Effendi, *Hukum Agraria di Indonesia: Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1989
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, CitraAditya Bakti, Bandung, 2000
- Ramelan, Eman, *Hak Pengelolaan Setelah Berlakunya Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999*, *Yuridika*, Vol. 15, No. 3, Mei-Juni 2000
- Ruchiyat, Eddy, *Politik Pertanahan Nasional Sampai Orde Reformasi*, Alumni, Bandung, 1999
- Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013
- Santoso, Urip, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Pranada Media Group, Jakarta, 2012
- _____, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010
- _____, *Perolehan Hak atas Tanah*, PT Revka Petra Media, Surabaya, 2011
- Soerodjo, Irawan, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia*, Surabaya, 2003
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2004.
- Sumardjono, Maria S.W, *Hak Pengelolaan: Perkembangan, Regulasi dan Implementasinya*, *Jurnal MIMBAR HUKUM*, Edisi Khusus, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, September 2007
- _____, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Kompas, Jakarta, 2001
- Sunindhia, dan Ninik Widjijanti, *Pembaharuan Hukum Agraria*, Bina Aksara, Jakarta
- Syahrani, Riduan, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1999

Wignjodipuro, Surojo, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Sumur Bandung, Jakarta, 1982

Zein, Ramli, *Hak Pengelolaandalam Sistem Undang-undang Pokok Agraria*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda, LN 1958 Nomor 162/UU No. 86 Tahun 1958

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agaria, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 No. 104- Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia No.2043.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1959 (LN 1959 Nomor 5/PP No. 2 Tahun 1959 tentang Pokok-Pokok Pelaksanaan UU No. 86 Tahun 1958

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pokok-Pokok Kebijakan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat.

Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria Republik Indonesia Nomor Sk. 8/Ka/1963 Tentang Pemberian Hak Atas Tanah Bekas Milik Perusahaan-Perusahaan Belanda Kepada Perusahaan-Perusahaan Negara dan Bank-Bank Negara

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 75- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4958.

Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 3- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4958.